MAKALAH

DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Ulangan Akhir Semester (UAS)
Mata kuliah Penulisan Ilmiah
Dosen Pengampu : Dr. Iman Subasman, M.Si**

Disusun oleh :

AA WASI'A

NIM : 20215011001

E-mail : aawasia04@gmail.com

**SEKOLAH PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AL-IHYA KUNINGAN
TAHUN AKADEMIK : 2020/2021**

ABSTRAK

Demokrasi dalam perspektif pendidikan agama Islam sejauh ini belum ada definisi yang kongkrit, perbedaan demokrasi barat dan demokrasi islam, begitu juga implementasi demokrasi yang belum sesuai dengan ajaran Islam, maka masalah yang akan timbul ialah bagaimana demokrasi menurut ajaran Islam? Bagaimana demokrasi dalam pemerintahan Islam? Dan sejauh mana hubungan demokrasi dengan pendidikan agama Islam?

Pada zaman sebelum ajaran Islam masuk orang-orang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan ikatan yang ada adalah ikatan pertalian darah. Tetapi sesudah ajaran islam masuk ikatan yang berlaku adalah ikatan agama. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-hujrat : 13, surat Al-imron : 26 dan 159 dan surat As-syura : 38.

Demokrasi menurut Islam sering disinonimkan dengan kata musyawarah (syura), secara mayoritas berfungsi sebagai bentuk pemerintahan. Walaupun realitanya sebenarnya lebih luas berfungsi ke seluruh aspek kehidupan yang islami.

Sistem demokrasi dalam menentukan kepemimpinan dan tata cara pengangkatan pemimpin menurut konsep Islam juga pemikiran-pemikiran ulama tentang konsep demokrasi menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara demokrasi barat dan demokrasi islam, diantara perbedaannya adalah demokrasi barat kekuasaan tertinggi hanya milik rakyat semata, sedangkan dalam demokrasi Islam kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan (Allah) dan syari'at islam dan rakyat eksistensinya hanya sebagai kholifah (wakil) Allah untuk mengurus dan mengelola Negara dengan tetap bersandar pada Al-qur'an dan Sunah. juga syari'at Islam

Hubungan demokrasi dengan pendidikan agam Islam sangat erat sekali karena dalam pendidikan adanya salah satu azas pendidikan yaitu faham demokrasi dan Islam selalu mengedepankan prinsip musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu.

Kata kunci : Demokrasi islam dan barat, Sistem Pemerintahan Islam dan Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

Democracy in the perspective of Islamic education so far has no concrete definition, the difference between western democracy and islamic democracy, as well as the implementation of democracy that is not in accordance with Islamic teachings, then the problem that will arise is how democracy according to Islamic teachings? How is democracy in Islamic government? And to what extent is the relationship between democracy and Islamic religious education?

In the age before Islam entered the people of ethnic groups and nationalities and the existing ties were blood ties. But after the teachings of Islam enter the bonds that apply are religious ties. This is in accordance with the word of Allah Surah Al-Hujrat: 13, Sura Al-Imron: 26 and 159 and Sura As-Shura: 38.

Democracy according to Islam is often synonymous with the word musyawarah (shura), largely functioning as a form of government. Even though the reality is actually wider, it functions to all aspects of Islamic life.

The democratic system in determining leadership and procedures for appointing leaders according to the Islamic concept as well as the thoughts of scholars on the concept of democracy shows that there are significant differences between western democracy and Islamic democracy, among the differences are western democracy, the highest power belongs only to the people, whereas in Islamic democracy The highest power is in the hands of God (Allah) and the Shari'ah of the past and the people are only as kholifah (representatives) of Allah to manage and manage the State while still relying on the Al-Quran and Sunnah. also Islamic law

The relationship between democracy and Islamic religious education is very close because in education there is one of the principles of education, namely the understanding of democracy and Islam always puts forward the principle of deliberation in deciding everything.

Keywords: Islamic and western democracy, Islamic Government System and Islamic Religious Education

PENGANTAR

Pada hakikatnya agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di dunia ini. Agama bukan hanya sekedar landasan faham ketuhanan yang sisitem ibadahnya terbatas kesadaran jasmani, aturan etis dan ritual saja. Sebab hal ini baru merupakan kesatuan aspek yang sangat sempit dan dapat dikategorikan pada urusan pribadi jika dimasukan dalam analisis aspek-aspek kehidupan manusia yang komplek ini.

Kehidupan beragama manusia bukan berupa penyempitan, hakikat agama yang tidak hanya berupa aktifitas khusus ditujukan kepada sang pencipta Allah SWT, tetapi didalamnya termasuk berbagai aktifitas kehidupan manusia yang positif, praktis dan realistik (Sayid Quthub, Islam Menyongsong masa depan, Shalahudin Press, Yogyakarta, 1987)

Dalam menjalankan aktifitasnya manusia tidak hanya muamalah yang bersifat vertikal (muamalah ma'allah), melainkan juga yang bersifat horizontal (Muamalah ma'annas). Sebagai makhluk yang telah diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka kita tidak lepas dalam kehidupan ini, baik dalam bernegara ataupun dalam berinteraksi sosial akan mengenal istilah "Demokrasi".

Menurut Amin Rais musyawarah/syura adalah demokrasi, akan tetapi sengaja kata demokrasi dihindarkan dalam konteks pembicaraan kita, oleh karena itu dewasa ini "demokrasi" telah disalah gunakan oleh berbagai Negara sedemikian rupa, sehingga mereka yang anti demokrasi juga menanamkan sistim demokrasi sebagai sistim Negara mereka, walaupun ditambah dengan suatu kata Demokrasi Rakyat.

Musyawarah yang diajarkan seperti diajarkan islam, akan menjadi pagar yang terlalu kuat bagi kemungkinan Negara kearah otoriterisme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistim lain yang membunuh hak-hak politik rakyat.

Partisipasi dan keikutsertaan rakyat dihargai sepenuhnya dalam pengelolaan Negara, berhubung rakyat adalah pemilik Negara yang sesungguhnya, yang seolah-olah mendapat dari Tuhan, sementara para pemimpin hanyalah merupakan pelayan-pelayan rakyat. Begitulah islam mengajarkan dan begitu pulalah seharusnya teori musyawarah harus dijalankan, prinsip musyawarah juga menandakan bahwa penguasa-penguasa Negara haruslah dipilih oleh rakyat secara jujur dan bebas, berdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan.

Dalam konsep demokrasi terdapat unsur pendidikan, yang dalam pengertian secara umum pendidikan ialah proses perkembangan kaecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan kelakuan yang berlaku dimasyarakat (Siti Meichati, Pengantar Ilmu Pendidikan, Yayasan Penerbit FIP IKIP Yogyakarta).

Konsep demokrasi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrosyidin akan menjadi tolak ukur demokrasi islam, pendidikan yang benar untuk belajar berdemokrasi suatu tuntutan bagi setiap individu. Konsep demokrasi dalam perspspekti Pendidikan agama islam menjadi hal menarik untuk penulis diformulasikan dalam judul "DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM"

Berdasarkan latar belakang masalah-masalah diatas, maka sebagai rumusan-rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep demokrasi menurut ajaran islam?
2. Bagaimana implementasi demokrasi dalam pemerintahan islam?
3. Sejauhmana hubungan demokrasi dengan pendidikan agama islam?

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas pemulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep demokrasi menurut ajaran islam
2. Untuk menjelaskan implementasi demokrasi dalam pemerintahan islam
3. Untuk mengetahui hubungan demokrasi dengan pendidikan agama islam

Titik tolak yang menjadi acuan kerangka pemikiran dalam masalah ini adalah ; a), Banyak orang berpendapat bahwa tanpa islam kita tidak bisa berdiri tegak, karena ia yang mengatur segala aspek kehidupan di dunia, termasuk masalah demokrasi. Demokrasi islam berbeda dengan demokrasi barat. Demokrasi barat kekuasaan tertinggi berdasarkan kedaulatan rakyat semata, sedangkan demokrasi islam kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan, hanya dilandasi prinsip khalifah (wakil). Konsep demokrasi islam berdasarkan Al-qur'an dan Sunah. Walaupun sebenarnya selama ini belum mempunyai pandangan yang konkrit terutama mengenai sistim pemerintahan yang bersifat islami dan sekaligus sesuai format sekarang (Amin Rais, Pemerintahan Islam, Mizan, Bandung). b). Bangsa Arab sebelum islam, hidup bersuku-suku (kabilah-kabilah) dan berdiri sendiri-sendiri, satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, kepemimpinan yang kharismatik dan kehidupan demokrasi. Yang ada hanyalah ikatan dan ta'ashub kabilah. Dasar perhubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. c). Menurut J. Comenius, bahwa azas pendidikan dan pengajaran salah satunya adalah faham demokrasi yaitu pendidikan dan pengajaran dengan yang diperuntukan untuk seluruh rakyat.

Pendidikan dan penajaran merupakan kebutuhan setiap individu dan berbicara masalah pendidikan cakupanya sangat luas, tidak hanya pendidikan yang berbentuk formal atau non-formal seperti sebuah lembaga pendidikan, tetapi menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, sebagai dasar pemikiran dalam sistem pemerintahan kita mengenal istilah demokrasi, kemudian adakah demokrasi itu dalam dunia pendidikan terutama menyangkut kehidupan manusia ?

PEMBAHASAN

I. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

A. Pengertian demokrasi

Kata demokrasi berasal bahasa Yunani, secara etimologi (lughot) terdiri dari dua suku kata yaitu kata demos = rakyat dan cratein= pemerintahan atau kratos = pemerintah. Adapun dalam bahasa Inggris demokrasi berasal dari kata democracy artinya persamaan dan dalam bahasa arab kata demikrasi sering disamakan dengan istilah Syura (musyawarah).

Kata demokrasi adalah antonim dari kata diktator (kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak) dalam bahasa arab kata ini diartikan tidak adanya “istibdad” (absolut) dalam seluruh bidang kehidupan yang menyangkut didalamnya kepentingan masyarakat.

B. Prinsip demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip kebebasan
3. Prinsip Persamaan

C. Fungsi dan Tujuan Demokrasi

fungsi-fungsi demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sifat pemerintahan
2. Sebagai bentuk pemerintahan modern

D. Tujuan Demokrasi

Adapun tujuan demokrasi ialah untuk memelihara urusan-urusan semua aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, peperangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain-lain.

Dan apabila melihat kembali sejarah islam pada abad pertama. Rosulullah SAW senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya dalam urusan-urusan duniawi. Dan ketika beliau sakit dan tidak bisa mengimami shalat, beliau menyuruh Abu Bakarliah yang menggantikannya. Hal ini dijadikan oleh para sahabat iyyarat atau petunjuk bahwa Abu Bakarliah yang berhak menjadi khalifah pengganti Rosulullah SAW, ini adalah musyawarah politik yang pertama dilakukan umat islam (ada yang menyebutnya sebagai ijma). Dan Abu Bakarpun bermusyawarah dengan para sahabat yang lain apabila ia akan memutuskan suatu masalah. Baik masalah agama maupun masalah keduniawian. (Media Pembinaan 1999 : 11). Jadi inilah model demokrasi yang tujuannya untuk mendapatkan suatu keputusan yang bijak dan adil maka tidak lepas harus ada musyawarah.

Menurut Arbi Sanit (1999:10) tujuan demokrasi adalah untuk menuju masyarakat yang demokratis. Dan langkah-langkahnya yang harus ditempuh antara lain :

1. Soal kepemimpinan harus ada pergantian dan dipilih oleh rakyat secara demokratis, dan sikap pemimpin harus terbuka sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat
2. Pemerintahan harus dapat berbuat kuat dan efektif dalam bertindak mengimplementasikan suatu kebijakan, tetapi juga mau dikontrol jika melakukan kesalahan. Kerana kontrol masyarakat yang akan menentukan tidak tepat, ini salah, ini tidak sesuai.

Menurut Muhammad Asad (1983 :74) tujuan demokrasi adalah pertumbuhan umat manusia yang membela persamaan dan keadilan, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, atau lebih tepat dikatakan manusia yang bekerja untuk kesejahteraan hidup secara adil.

E. Macam-macam demokrasi

Untuk membahas macam-macam demokrasi ditinjau secara global dan universal sangat banyak sekali, hampir semua dimensi ada unsur demokrasi, seperti demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan, demokrasi politik dan lain-lain. Begitu juga dalam sebuah pemerintahan macam demokrasi berbeda-beda seperti kita kenal demokrasi liberal yang hampir dipakai oleh sebagian besar pemerintahan barat, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila yang dipakai di NKRI. Tetapi dalam hal ini penulis akan mengutamakan macam-macam demokrasi ditinjau dari segi sifatnya.

Menurut Inayatullah (2002: 39) macam-macam demokrasi ditinjau dari sifatnya ada 2 macam yaitu :

1. Demokrasi Kultural (Cultural Democracy) yaitu model demokrasi yang banyak dipengaruhi oleh kultur bangsa dan agama, pengaruh suatu agama pada demokrasi merupakan yang sangat kompleks.
2. Demokrasi Struktural (Structural Democratisation) ialah demokrasi yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan Negara, masyarakat, institusi Negara dan institusi politik

F. Demokrasi dalam pandangan suatu Negara

1. Menurut Ibnu Taimiyah 1983 :171

Negara dalam bahasa beliau adalah imamah, imamah ini timbul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, karena pada masa ini disebut periode nubuwwah bukan imamah (Negara).

Sebagai Kesimpulannya Negara menurut Ibnu Taimiyah :

- a. Insitusi imamah, walaupun tidak merupakan unsur imam menjadi salah satu fungsi utama Nabi Muhammad SAW dikemudian hari
- b. Imamah tidak berada diluar tetapi tercakup kedalam kenabian.
- c. Nabi Muhammad memang menegakan Negara, tetapi tidaklah tepat jika menyebutnya sebagai raja dan negaranya itu sebagai Negara. Rejimnya adalah rejim kenabian dan ia hanyalah seorang nabi.
- d. Imamah hanya lahir setelah nabi meninggal dunia

2. Menurut Al-iji seorang sunni ortodok :48 mengatakan :” Imamah bukanlah salah satu azas dan praktek agama. Maksudnya beliau juga menyebut Negara dengan istilah imamah, sebagaimana diyakini orang-orang syi’ah. Menurutnya imamah adalah salah satu dari detail-detail (furu’) yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang beriman.

Definisi imamah menurut Al-iji adalah Negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan imamah adalah sebagai wakil Nabi dalam menegakan agama.

Konsep demokrasi dalam pandangan sebuah Negara sangatlah penting bagaimana kita menganal Negara-negara barat dengan demokrasi liberalnya dan dalam pemerintahan islamadanya azas musyawarah yang awalupun dalm implementasinya sangat Bergama tetapi setiap Negara jika ingin menjadi “good government” harus berjalannya sistim demokrasi yang baik.

Bangunan paradigma baru tentang demokrasi bagi suatu Negara secara teoritis sangat optimis, tetapi mesti ada kehati-hatian sehubungan prospek demokrasi bagi Negara-negara yang tengah berada pada episode transisional. Ini dalam pengertian bahwa hasil akhir proses transisi itu belum tentu kehidupan yang demokratis, bahkan bisa saja kehidupan yang lebih otoriter. Maka perlu mereformasi sistim demokrasi yang baik sehingga akan terwujud Negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya (Baladun Toyibatun wa Robbun ghofuur).

II. DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Demokrasi menurut ajaran Islam

1. Implementasi Demokrasi pada Pemerintahan Islam

Ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah (622 M), sebuah komunitas baru orang-orang beriman didirikan disana. Komunitas inilah terdiri dari kaum Anshor yaitu orang-orang Madinah yang mengikuti mereka dan kaum Muhajirin yaitu orang-orang yang pindah dari Mekah. Pada masa itu, di jazirah arab hanya ada satu model komunitas. Komunitas suku yang didasarkan pada pertalian darah. sejak awal kemunculannya islam sebagai pola hubungan sosial , dipertentangkan dengan model komunitas suku yang berdasrakan pertalian darah tersebut. Dengan demikian, komunitas baru orang-orang beriman tersebut merupakan kumpulan suku, namun yang berdasarkan hubungan keyakinan keagamaan dan bukannya berdasarkan hubungan darah.

Inilah asal usul berdirinya pemerintahan islam, nabi merupakan pemimpin perkumpulan atau komunitas baru tersebut. Komunitas orang-orang beriman dan kehidupannya berubah sedikit demi sedikit sehingga timbulah benih-benih demokrasi untuk pertama kali dalam sebuah pemerintahan. Seperti

adanya hak-hak yang sama dengan kepala-kepala suku lainnya dan hak-hak keagamaan (Muhammad Said Al-ashmawi, 2002 :1)

Konsep demokrasi dalam pendidikan islam sering disebut dengan gagasan musyawarah, dalam bahasa arab syura. Konsep demokrasi di zaman nabi berbeda dengan konsep demokrasi era sekarang. Konsep islam dalam berdemokrasi harus sesuai firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Imran :159 yang artinya “.. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (duniawi) kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.. “ (QS 3 : 159).

Banyak pendapat bahwa islam menyetujui Negara didasarkan pada dominasi kekuatan satu orang atau satu partai. Konsep islam tentang pentingnya demokrasi pada pemerintahan bahwa Negara harus didasarkan pada persetujuan rakyat dan kerjasama rakyat makanya islam menjadikan musyawarah sebagai prinsip utamanya. Demokrasi dalam islam tidak akan terwujud kecuali melalui kombinasi tiga unsur : syari'at, bangsa yang diwakili oleh pemimpinnya dan imam yaitu sebagai kepala negara yang terpilih.

Pemerintahan islam berbeda dengan pemerintahan lain, tidak didasarkan pada konsep kebangsaan dan ras, melainkan semata-mata berdasarkan ideologi Al-qur'an, Sunnah dan Syari'at islam

2. Sistem Demokrasi dalam menentukan pemimpin menurut konsep islam.

Sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin menurut konsep islam sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika itu pengangkatannya dengan jalan musyawarah atau pemilihan, sebagaimana yang terjadi dalam pengangkatan sahabat Abu Bakar , sebagai khalifah pertama.

Nabi Muhammad SAW tidak pernah berwasiat tentang penggantinya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada umat islam. Dan umat islam akan memilihnya secara demokrasi.

Kaum muhajirin dan anshor berkumpul di rumah keluarga Bani Saidah membicarakan pengganti Rosulullah. Kaum Anshor merasa berhak menjadi khalifah karena mereka membantu Rosulullah semasa di Madinah, demikian juga kaum Muhajirin merasa berhak karena mereka yang paling pertama masuk islam. Hampir saja timbul perpecahan untunglah Allah segera menurunkan hidayah. Umat islam dengan suara bulat memilih dan membaia Abu Bakar menjadi khalifah. Inilah proses awal adanya demokrasi dalam menentukan pemimpin dalam islam (H.Sulomo, 1994:83)

B. Hubungan pendidikan agama Islam dengan demokrasi

Azas pendidikan dan pengajaran salah satunya adalah faham demokrasi yaitu pendidikan dan pengajaran dengan cara yang sama harus diperuntukan untuk seluruh rakyat tidak pandang bulu, baik miskin, kaya lelaki ataupun perempuan, baik di Kota maupun di Desa (J.Comenius 1974 : 43)

Dalam dunia pendidikan penerapan demokrasi sangat diperlukan apalagi dalam persepektif islam, proses demokrasi dari seorang guru kepada siswanya,

sehingga harapannya adalah terwujudnya dan tercapainya tujuan pendidikan agama islam. Hubungan pendidikan agama islam dengan demokrasi sangat erat sekali kaitannya.

Menurut Muammar Qathafi (2000 :135) bahwa demokrasi pendidikan tidak mengharuskan kurikulum yang sistematis dan mengklasifikasikan materi dalam buku dan teks yang dipaksakan kepada anak didik untuk mempelajarinya sambil duduk diatas kursi. Model pendidikan yang mendominasi diseluruh dunia ini berarti pemaksaan bukan demokratis. Wajib belajar merupakan penghapusan secara paksa atas kecakapan manusia dan ini merupakan kediktatoran yang merusak kebebasan , kreatifitas dan kecerdasan.

Adapun sistim demokrasi secara luas tidak hanya ada dalam bentuk pemerintahan saja, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan dari mulai kehidupan mikro sampai kepada kehidupan makro.

Contoh salah satu harus ada demokrasi adalah dalam kehidupan di keluarga , orang tua tidak boleh otoriter kepada anak-anaknya dalam segala hal termasuk masa depan anak-anaknya. Tumbuhkan kehidupan yang demokratis dalam keluarga seperti dicontohkan ajaran islam yaitu kisah nabi Ibrohim A.S. ketika proses adanya hokum Qurban terhadap Ismail A.S, disini jelas adanya proses dialog artinya ada demokrasi disana.

C. Pemikiran ulama tentang demokrasi

Pada dasarnya sebagian besar ulama atau pemikir-pemikir islam mengatakan bahwa demokrasi itu penting , tetapi implementasinya ada perbedaan konsep demokrasi islam dan demokrasi barat

Demokrasi menurut ibnu Taimiyah kerjasama diantara komponen masyarakat dan kekuasaan adalah syari'ah, pelaksanaanya oleh semua anggota masyarakat serta pemegangnya terletak ditangan ulama dan umara. Yang mana maksud ulama tidak hanya ahli agama tetapi siapa saja yang ahli mengurus dan memajukan Negara.

D. Perbandingan Demokrasi islam dan Demokrasi barat

Karakteristik	Demokrasi Barat	Demokrasi Islam
Fungsi Normatif	Kebebasan individu	Penyelamatan setelah mati
Citra tentang manusia	Masyarakat umum dengan hak-hak yang bisa dilanggar	
Konsep tentang masyarakat	Masyarakat syarat konflik plurarisme kelompok dan gagasan, konsensus dasar tentang fungsi normatif dan kelembagaan struktur demokrasi	Bayangan tentang konsensus dasar tentang fungsi islam sebagi nilai dominan, dengan orientasi utama monisme kelompok dan gagasan
Yang berdaulat	Rakyat	Tuhan (bersama rakyat)
Tabiat politik	Pergumulan/kompetisi	Pelaksanaan kehendak

	sehari-hari antara kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu	Tuhan
Pendekatan kelembagaan	kontrol kekuasaan	Mempertahankan dan menegakan syari'at
Legitimasi kekuasaan	Melalui pemilu yang demokratis	
Perwakilan	Pelimpahan kekuasaan kepada lembaga-lembaga perwakilan	
Pergantian kekuasaan	Melalui pemilu yang demokratis	
Tanggung jawab penguasa	Kepada rakyat	Kepada Tuhan / syari'ah
Partai	Kepentingan tertentu yang tergagasi	
Penyelesaian konflik	Melalui kekuasaan mayoritas	Melalui penafsiran atau syari'ah via penguasa yang syah
Elit	Kelompok-kelompok yang terbuka dan resmi	
Mekanisme control	Pemilu demokratis dan pemishan kekuasaan	Syura

KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti masalah demokrasi dalam perspektif pendidikan agama islam, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Demokrasi dalam perspektif pendidikan agama islam bahwa demokrasi barat berbeda dengan dengan demokrasi islam, kalau demokrasi barat berdasarkan kedaulatan tertinggi atau sepenuhnya ada ditangan rakyat semata, sedangkan demokrasi islam berdasarkan kedaulatan tertinggi sepenuhnya di tangan Tuhan (Allah SWT) dan syari'at (hukum islam) dan rakyat kedudukannya hanya sebagai khalifah (wakil) Tuhan dan syari'at untuk menjalankan dan melaksanakan perintah Tuhan (Allah SWT) dan syari'at (hukum Islam).
2. Pemerintahan islam berbeda dengan pemerintahan selain islam. Pemerintahan islam berdasarkan ideologi Al-qur'an dan Sunnah, sedangkan pemerintahan selain islam didasarkan pada suku, ras dan kebangsaan.
3. Demokrasi menurut islam sering disinonimkan dengan kata musyawarah (syura), secara mayoritas berfungsi sebagai bentuk pemerintahan. Walaupun realitanya sebenarnya lebih luas berfungsi ke seluruh aspek kehidupan yang islami, Karena islam adalah Negara dan tanah air atau pemerintah dan umat, sebagaimana islam juga aqidah dan ibadah sekaligus. Maka demokrasi harus ada dalam keluarga, sekolah dan masyarakat apalagi dalam berbangsa dan bernegara.
4. Pemerintahan islam berdiri pertama kali sejak nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin hijrah dari mekah ke Madinah dan di Madinahlah mulai terbentuk tatanan pemerintahan dan syari'at berlaku. Nabi sebagai kepala negaranya. Disinilah implementasi demokrasi pertama kali dijalankan.
5. Hubungan pendidikan agama islam dengan demokrasi sangat erat sekali karena pendidikan agama islam menitik beratkan dalam ajarannya rahmatan lil'alamin, tidak membedakan ras, suku dan agama serta prinsip musyawarah dalam segala urusan. Inilah yang menjadi pokok dalam muamalah ma'annas (hubungan antar manusia). Selain itu juga dalam pendidikan adanya salah satu azas pendidikan yaitu faham demokrasi, dimana pendidikan diperuntukan seluruh rakyat dengan tidak pandang bulu, hak bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan dan unsur-unsur yang terkait ialah keluarga, sekolah dan masyarakat.

REFERENSI

Alqur'anul karim

Muammar Qathafi, (2000). Menapak Jalan Revolusi. Yogyakarta : Insist Pres kerjasama dengan Pustaka Pelajar

Ulil Abshar Abdalla, (2002). Islam dan Barat Demokrasi dalam Masyarakat Islam. Jakarta ; FNS Indonesia dan Pusat studi Islam Paramadina

Ahmad Azhar Basyir, (2000). Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Yogyakarta; UII Press

Ahmad Tafsir, (1991). Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya

Haidar Bagir (Penyunting), (1991). Satu Islam Sebuah Dilema, Bandung; Mizan

Ibnu Taimiyah, (1989). Karakteristik Wali Allah Wali Setan, Solo; Ramadhani.

L. Amin Widodo, (1994). Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional, Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogya.

Salim Azzam dan Amin Rais (Pengantar) (1983). Beberapa pandangan tentang Pemerintahan Islam, Bandung; Mizan

Sulomo, (1994). Sejarah Kebudayaan Islam, Semarang; Wicaksana

Muhammad Asad, (1981). Islam disimpang Jalan, Bandung; Pustaka Salman ITB

Abul A'la Maududi, (1989). Menembus Cakrawala Islam, Solo; Ramadhani

Bahtiar Effendy, (2000). (Re)Politisasi Islam Pernahkah Islam berhenti berpolitik?, Bandung;Mizan Media Utama.

Siti Maichati, (1982). Pengantar Ilmu Pendidikan, Yogyakarta; Yayasan Penerbitan FIP-IKIP Yogyakarta.